



LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2021

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 merupakan bentuk evaluasi untuk menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah di tetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) masih belum maksimal. Oleh karena itu upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Madiun, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

JARIYANTO, S.Sos,M.Si

Pembina

NIP. 19730329 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	
1.2. LANDASAN HUKUM	
1.3. TUJUAN PENYUSUNAN	
1.4. GAMBARAN UMUM	
BAB II RENCANA KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	
1. Tujuan	
2. Sasaran	
B. RENCANA KINERJA	
1. Sasaran Dan Indikator Sasaran	
2. Program	
3. Kegiatan	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini ;	
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Bulan Terakhir ;	
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah ;	
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional Maupun Provinsi (Jika ada) ;	
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan ;	
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ;	
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian	

Pernyataan Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Renstra Tahun 2019 - 2024
2. Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah
3. Ringkasan Pengukuran Kinerja
4. Daftar Penghargaan Yang Diterima Perangkat Daerah Tahun 202

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta upaya mewujudkan good governance maka perlu disusun laporan kinerja yang merupakan aktualisasi semangat reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk lebih mendayagunakan aparatur negara, yaitu tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, juga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan akuntabel melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024, Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama tahun 2021.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan

tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana sebagai implementasi dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- b. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- c. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- e. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021 ;
- f. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 ;
- g. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran PAPBD TA 2021 ;
- h. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran PAPBD Tahun 2021 ;
- i. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024 ;
- j. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
- k. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Adapun tujuan penyusunan dari Pelaporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini untuk memberikan :

- a. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya ;
- d. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Madiun dikandung maksud sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pasca bencana.

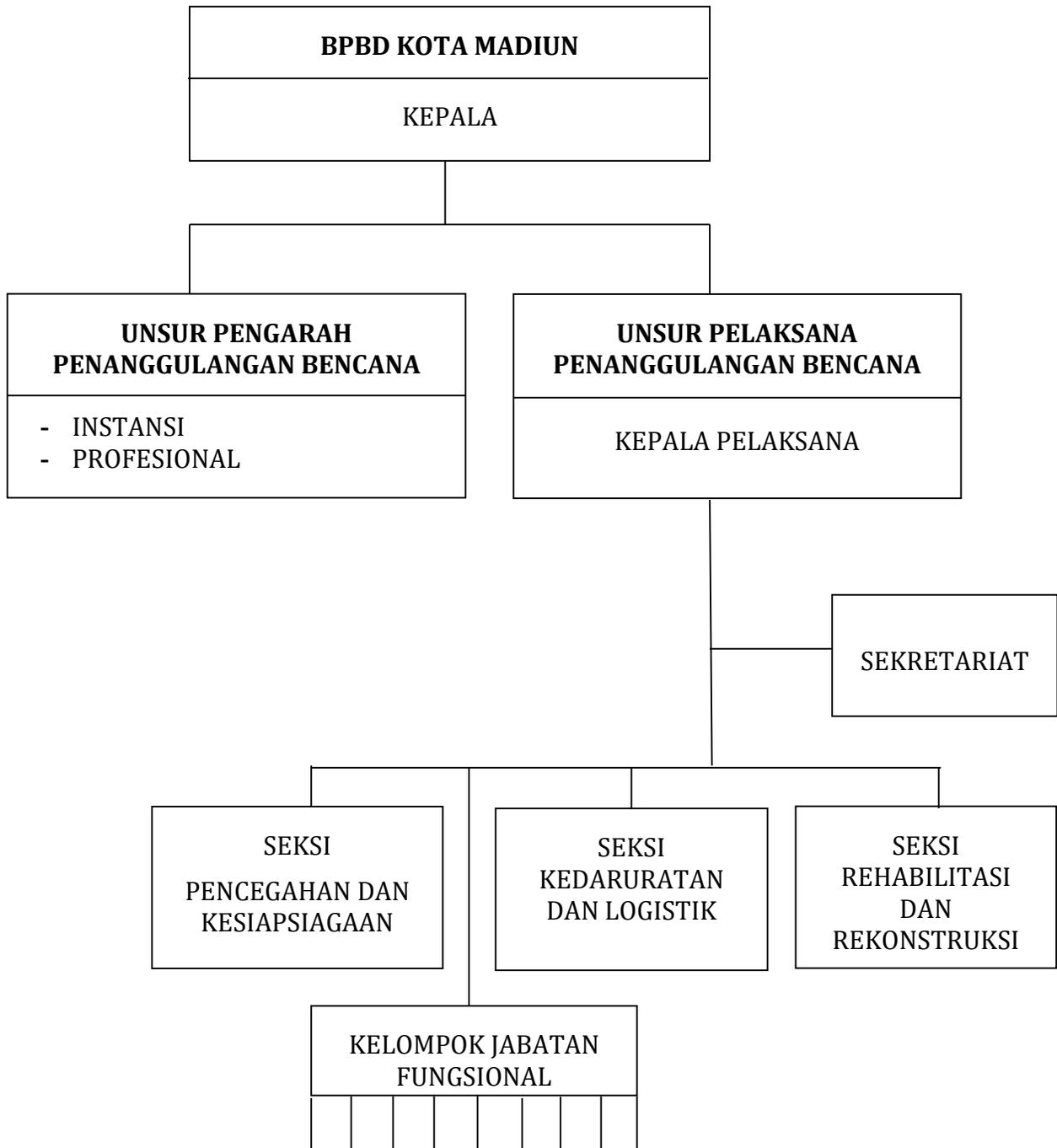
Implementasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

- a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terdapat Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**



Sumber Daya BPBD Kota Madiun

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di dukung oleh sumber daya yang dimiliki, diantaranya :

- Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun saat ini memiliki atau di dukung oleh 11 (sebelas) orang pegawai PNS, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah PNS		Jumlah Tenaga Kontrak		Pendidikan						Golongan					Jabatan / Eselon			
	L	P	L	P	S D	S M P	S M A	D 3	S 1	S 2	IV	III	II	I	TK	II	III	IV	Staf/ Pelaksana
1.	7	4	0	0	0	0	4	2	3	2	1	6	4	0	0	0	1	4	6

Berdasarkan tabel diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memiliki jumlah Pegawai sebanyak 11 (sebelas) orang dan mayoritas berjenis kelamin Laki – laki yaitu 7 (tujuh) orang, sisanya Perempuan 4 (empat) orang.

Dengan tingkat Pendidikan sebagian besar SMA/ sederajat sejumlah 4 (empat) orang, Sarjana Muda/D3 : 2 orang, Sarjana/S1 : 3 (tiga) orang dan S2 : 2 (dua) orang.

Dari 11 (sebelas) orang pegawai tersebut dilihat dari tingkat golongan, paling banyak terdiri dari Golongan III : 6 (enam) orang ; Golongan II : 4 (empat) orang ; Golongan IV : 1 (satu) orang.

Jabatan berdasarkan Eselon tersedia sebagai berikut : Eselon II : 0 (kosong), Eselon III : 1 (satu) orang, Eselon IV : 4 (empat) orang dan Staf/Pelaksana sejumlah : 6 (enam) orang.

- Sarana Prasarana Kantor

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	1	Baik
2.	Peralatan Dan Mesin	616	Baik
3.	Gedung Dan Bangunan	4	Baik
4.	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	3	Baik
 (lainnya)		

Isu Strategi

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan penanggulangan bencana.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu seperti : banjir, puting beliung dan kebakaran yang penanggulangannya mendasar pada kearifan lokal dengan sumberdaya yang memadai ;
2. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara – cara menghadapinya serta kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan ;
3. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana ;
4. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana sehingga perlu ditingkatkan koordinasi di lintas SKPD ;
5. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Madiun yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

Meskipun urusan pemadam kebakaran sudah tidak menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tetapi secara teknis apabila sewaktu-waktu ada laporan dari Call Center 112 ataupun laporan dari warga langsung telah terjadi kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan adanya Team Reaksi Cepat (TRC) melalui Piket

Siaga Bencana oleh para relawan siap membantu dan berperan aktif dalam penanganan darurat kebakaran.

Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan di Kota Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mendasar pada aspek – aspek yang meliputi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas serta lingkup luas wilayah Kota Madiun.

Sebagai unsur pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun melaksanakan fungsi koordinasi dengan Dinas atau Instansi vertikal dan horizontal di daerah, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat darurat atau terjadinya bencana dan pasca bencana. Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana, juga sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mengampu pada Misi ke 4 RPJMD Kota Madiun yaitu ***Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun*** dengan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi serta penyelenggaraan kebutuhan penanggulangan bencana dengan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

A. Rencana Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan **Tujuan** organisasi yaitu : **“Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh”**. Yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana”**. Dengan pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk pengurangan resiko bencana dengan tanggap dan tangguh yang dimulai saat menerima informasi dari warga atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian bencana yang langsung melakukan penanganan bencananya.

Tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana yaitu **“Tanggap”** berarti peka atau paling tidak mengenali gejala – gejala atau potensi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. **“Tangguh”** berarti memiliki ketahanan (resilience) dalam menghadapi resiko bencana yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan seoptimal mungkin ketika bencana terjadi.

INDIKATOR KINERJA

Adapun untuk mengetahui lebih jelas tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun bisa di lihat dalam tabel di bawah ini.

No	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2024
1.	Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh	Cakupan penanganan penanggulangan bencana	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	76	80.50	-	-	-
2.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja setiap perangkat daerah tercapai apabila indikator dari sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai.

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah menetapkan Sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.50
2.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	100 %
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100 %
		Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut dari dana APBD Kota Madiun Tahun 2021 sebesar Rp. **3.327.941.000,00** (Tiga Milyard Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Berikut Program Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 :

1. Program

Adapun Program Kegiatan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.327.941.000,00 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan dana sebesar Rp. 1.950.082.000,00
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan dana sebesar Rp. 1.377.859.000,00

2. Kegiatan

Guna melaksanakan Program tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 melakukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,00.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.092.850.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 1.092.850.000,00.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 65.000.000,00.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.350.000,00
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 53.350.000,00
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 498.790.000,00 ;

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan dana sebesar Rp. 498.790.000,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 220.092.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 170.092.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,00.

2. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.211.000,00 ;
 - Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan dana sebesar Rp. 72.211.000,00
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.208.120.000,00
 - Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 92.253.000,00
 - Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan dana sebesar Rp. 75.717.000,00
 - Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 111.350.000,00
 - Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 928.800.000,00
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.528.000,00.
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 97.528.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan good governance juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Selaku pengemban amanah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berkewajiban menyusun atau membuat Laporan Kinerja yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi menyeluruh untuk mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan.

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 disusun berdasarkan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dalam bentuk laporan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat dilakukan melalui pengukuran berdasarkan tingkat capaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran.

Tabel 3.1
Tabel Sasaran, Indikator Sasaran, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun
Tahun 2021

No	Sasaran				Capaian Kinerja
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.50	80.97	100.6%
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana.	1. Persentase Early Warning System(EWS) di daerah rawan bencana.	100%	100%	100%
		2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).	100%	100%	100%
		3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%	100%	100%

Dari tabel diatas bisa dijelaskan bahwa :

- a. Indikator Kinerja dari sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah“ memuat untuk hasil Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan dari pokja reformasi birokrasi.
- b. Indikator Kinerja dari sasaran “Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana “ di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penanggulangan Bencana, dengan 3 (tiga) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan. Untuk ke 3 (Tiga) Indikator Kinerja Sasaran tersebut diatas untuk target dan realisasi sebesar 100%, dimana nilai capaian kinerjanya juga mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk penanganan bencana / pengurangan resiko bencana yang dimulai saat menerima informasi dari Call Center 112 atau dari warga yang langsung minta bantuan maupun dari alat yang terpasang sebagai tanda adanya bencana. Dengan sampainya di tempat kejadian bencana petugas langsung melakukan penanganan bencana dan semua selesai tertangani.

Adapun jenis bencana yang tertangani sebagai berikut :

No.	Nama Bencana	Jumlah kejadian	Jumlah yang tertangani	Korban
1.	Angin Puting Beliung - Pohon Tumbang - Rumah Roboh	27 kali 5 kali	27 kali 5 kali	- 3 orang
2.	Banjir/Genangan Air	5 kali	5 kali	-
3.	Pencarian dan Pertolongan (SAR) (Tenggelam, Bunuh Diri, Kecelakaan, Animal Resque)	147 kali	147 kali	8 orang
4.	Kebakaran	14 kali	14 kali	1 orang

Dalam penanganan bencana juga didukung dengan peralatan penanggulangan bencana yang siap digunakan sesuai peruntukannya pada saat tanggap darurat bencana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tahun 2014 – 2019).

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target (%)	Nilai Kinerja Capaian (%) / Realisasi				Ket.
				2018	2019	2020	2021	
1.	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana.	1. Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana.	100	-	-	100	100	
		2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).	100	100	100	100	100	
		3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100	-	-	100	100	

Berdasarkan indikator kinerja sasaran diatas untuk Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana dan Persentase Korban Bencana Yang Tertangani merupakan indikator kinerja sasaran tahun pertama dalam Renstra Tahun 2019-2024.

Dan dari tabel diatas terlihat bahwa nilai capaian Indikator Kinerja Sasaran dari tahun ke tahun sesuai target, hal tersebut menunjukkan bahwa program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dapat terlaksana dengan baik di dukung pula oleh kegiatan pelayanan kebencanaan secara rutin dan siap penanganan bencana apabila sewaktu waktu terjadi bencana.

Berikut data penanganan bencana yang telah dilaksanakan :

No.	Tahun	Jenis Bencana					Ket.
		Banjir/ Genangan Air	Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang	Pencarian Orang Tenggelam	Kebakaran	Lain - Lain	
1.	2017	3	7	1	28	2	Perbantuan (Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Ponorogo Dan Pacitan)
2.	2018	4	15	4	52	6	Animal Resque, Orang bunuh diri, Korban Laka
3.	2019	33	72	-	38	44	- Pencarian dan Pertolongan (41) : (Vertical Resque, Animal Resque, Pertolongan Pertama Kecelakaan Transportasi, Pencarian orang hilang, dan Percobaan bunuh diri) ; - Kekeringan (2) : Kelurahan Kelundam Tawangrejo) ; - Sosial (1) : Bentrok Perguruan Silat.
4.	2020	5	33	-	29	103	- Lain – lain (103) : Untuk Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

5.	2021	5	32	4	14	143	- Lain – lain (143) : Pencarian dan Pertolongan (SAR) (Tenggelam, Bunuh Diri, Kecelakaan, Animal Resque)
----	------	---	----	---	----	-----	---

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun :

Realisasi kinerja yang telah diperoleh pada tahun 2021 tertuang pada tabel di bawah ini yang merupakan realisasi tahun pertama perencanaan jangka menengah untuk periode Renstra Tahun 2019-2020.

Berikut target kinerja sesuai Renstra BPBD Kota Madiun dan realisasi kinerja Tahun 2021 :

Tabel 3.3
Target Renstra BPBD Kota Madiun dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra Tahun 2019-2024 (2020)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021
1 .	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana.	1. Persentase Early Warning System(EWS) di daerah rawan bencana.	100%	100%
		2. Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).	100%	100%
		3. Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	100%	100%

Melihat tabel diatas bisa dijelaskan bahwa Sasaran “Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana” telah tercapai dengan nilai capaian kinerja untuk Tahun 2021 mencapai 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Standar Nasional
Realisasi Kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Standar Nasional adalah Nihil.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, terdapat keberhasilan / peningkatan dan kegagalan / penurunan kinerja diantaranya :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Keberhasilan / Peningkatan	Kegagalan / Penurunan	Ket.
1.	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana.	Terpasangnya alat Early Warning System (EWS)	--	Program Penanggulangan Bencana
2.	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).	Seegera ditindaklanjuti oleh Team Reaksi Cepat (TRC) Piket Siaga Bencana apabila ada pengaduan / laporan kejadian bencana	--	
3.	Persentase Korban Bencana Yang Tertangani	Penanganan korban bencana secara tuntas	--	

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian keberhasilan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada ditunjang oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Kondisi wilayah Kota Madiun dimana luas wilayah Kota Madiun hanya 33,23 Km² terbagi dalam 3 (tiga) Kecamatan sehingga memudahkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebencanaan ;
- b. Tercukupinya sarana prasarana penanggulangan bencana seperti Mobil Ranger, Mobil Evakuasi, Mobil Rescue, Mobil Tangki Air, Perahu Karet, Sepeda Motor Trail dan peralatan bencana penunjang lainnya ;
- c. Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
- d. Dukungan Dana dari APBD Kota Madiun ;
- e. Adanya koordinasi dengan Instansi terkait, Lembaga/organisasi kebencanaan serta partisipasi masyarakat ;

- f. Adanya dukungan 37 (tiga puluh tujuh) orang Team Reaksi Cepat (TRC) / Piket Siaga Bencana (Relawan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala. Kendala pada saat ini adalah belum maksimalnya keahlian pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun karena pengetahuan akan penanganan bencana perlu ditingkatkan lagi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Program kegiatan rutin yang menunjang tercapainya sasaran :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah“, yang terdiri dari :

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran :

“Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana” terdiri dari :

➤ Program Penanggulangan Bencana, dengan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota ;
2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ;
3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana ;

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja bisa dilihat dalam pengelolaan keuangan Tahun 2021 melalui tabel realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Program Pendukung)	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	1.950.082.000	1.826.569.610	93.67
2.	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana.	1. Penanggulangan Bencana	1.377.859.000	1.298.855.181	94.27
		Jumlah	3.327.941.000	3.125.424.791	93.915

Analisis Efisiensi anggaran atas penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Rata - rata capaian kinerja	% Serapan Anggaran	Efisiensi Anggaran
1.	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana	100	93.915	6.085

Dengan melihat tabel diatas dapat dijelaskan rata - rata capaian kinerja dari Sasaran "Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana" lebih besar nilainya daripada persentase serapan anggaran maka bisa disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2021 Efisiensi Anggaran telah terpenuhi.

Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui besarnya Efisiensi Anggaran, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \text{Rata - rata capaian kinerja} - \text{Serapan anggaran} \\ &= 100 - 93.915 \\ &= 6.085 \end{aligned}$$

Faktor Pendorong pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari adanya Dana dan sumberdaya yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun meskipun dengan Dana dan Personil yang terbatas.

Sedang untuk Inovasi atau penghargaan yang pernah diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun selama Tahun 2021 yaitu Terbaik II untuk Lomba KBK (Kelompok Budaya Kerja) se Kota Madiun dengan tema “ SIGAP “.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian keberhasilan sasaran capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dengan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 serta dalam mewujudkan good governance yang sudah terealisasi sesuai dengan target dan efisien.

Capaian Kinerja yang telah dicapai berdasarkan sasaran dan indikator kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 semuanya dapat terealisasi 100%. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi seluruh komponen, baik dari masyarakat, pemangku kepentingan (Stakeholder) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun maupun para Team Reaksi Cepat (TRC) / Piket Siaga Bencana (Relawan).

Berdasarkan capaian kinerja yang sudah tercapai dengan target yang telah ditentukan dan untuk tindak lanjut ditahun berikutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun akan tetap mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi dengan melanjutkan program kegiatan yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas bagi berbagai pihak yang membutuhkan serta sebagai upaya perbaikan pelaksanaan program kegiatan pada masa yang akan datang.

Madiun, Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

JARIYANTO, S.Sos,M.Si
Pembina
NIP. 19730329 199403 1 003

LAMPIRAN :

- a. Matriks Renstra
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
- c. Daftar Penghargaan yang diterima Tahun 2021